



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

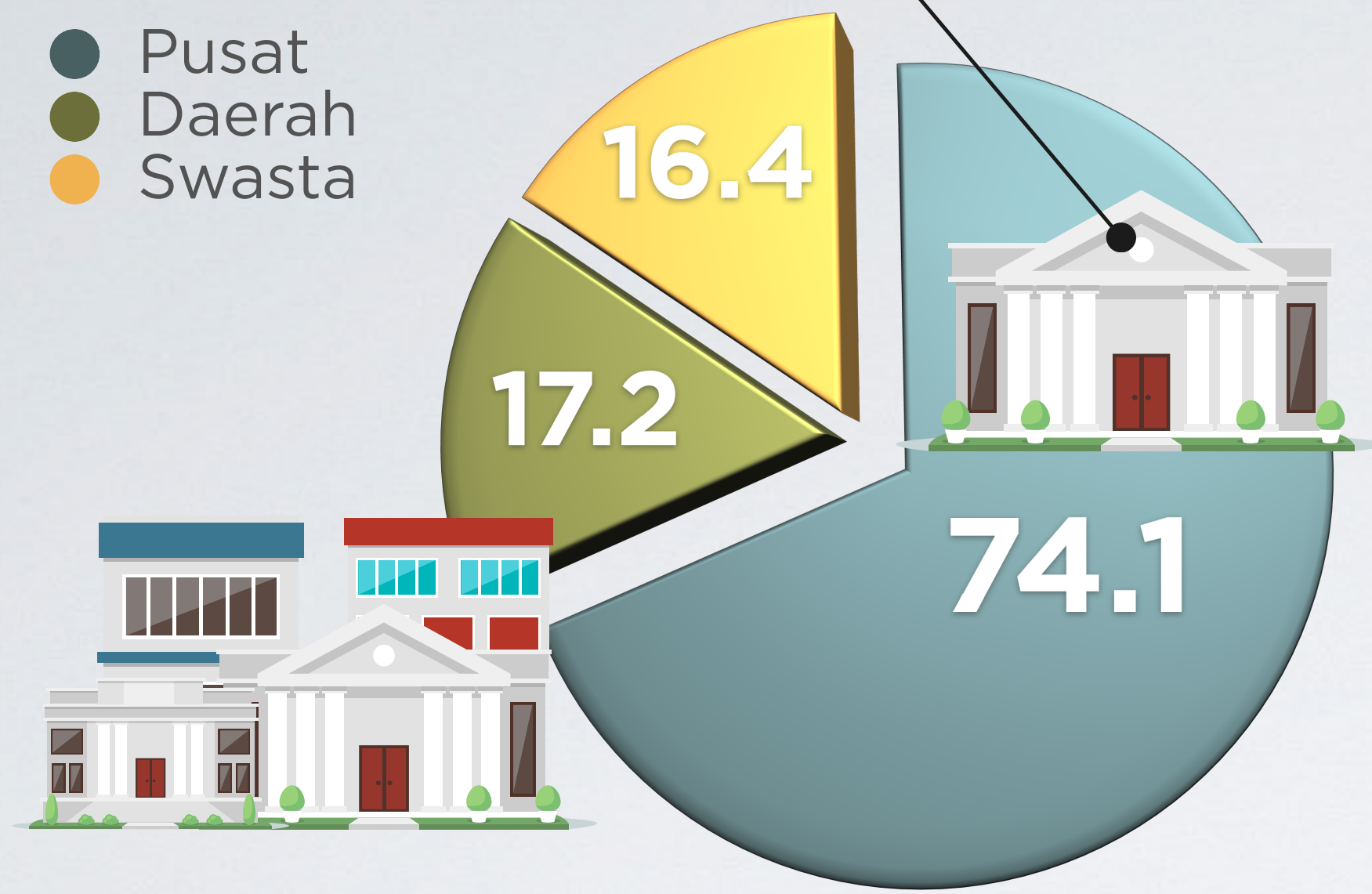


# **SURVEY PEMERINTAHAN YANG BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)**

PADA ASISTEN DEPUTI PENANGGULANGAN KEMISKINAN,  
DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  
MANUSIA DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN,  
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN.

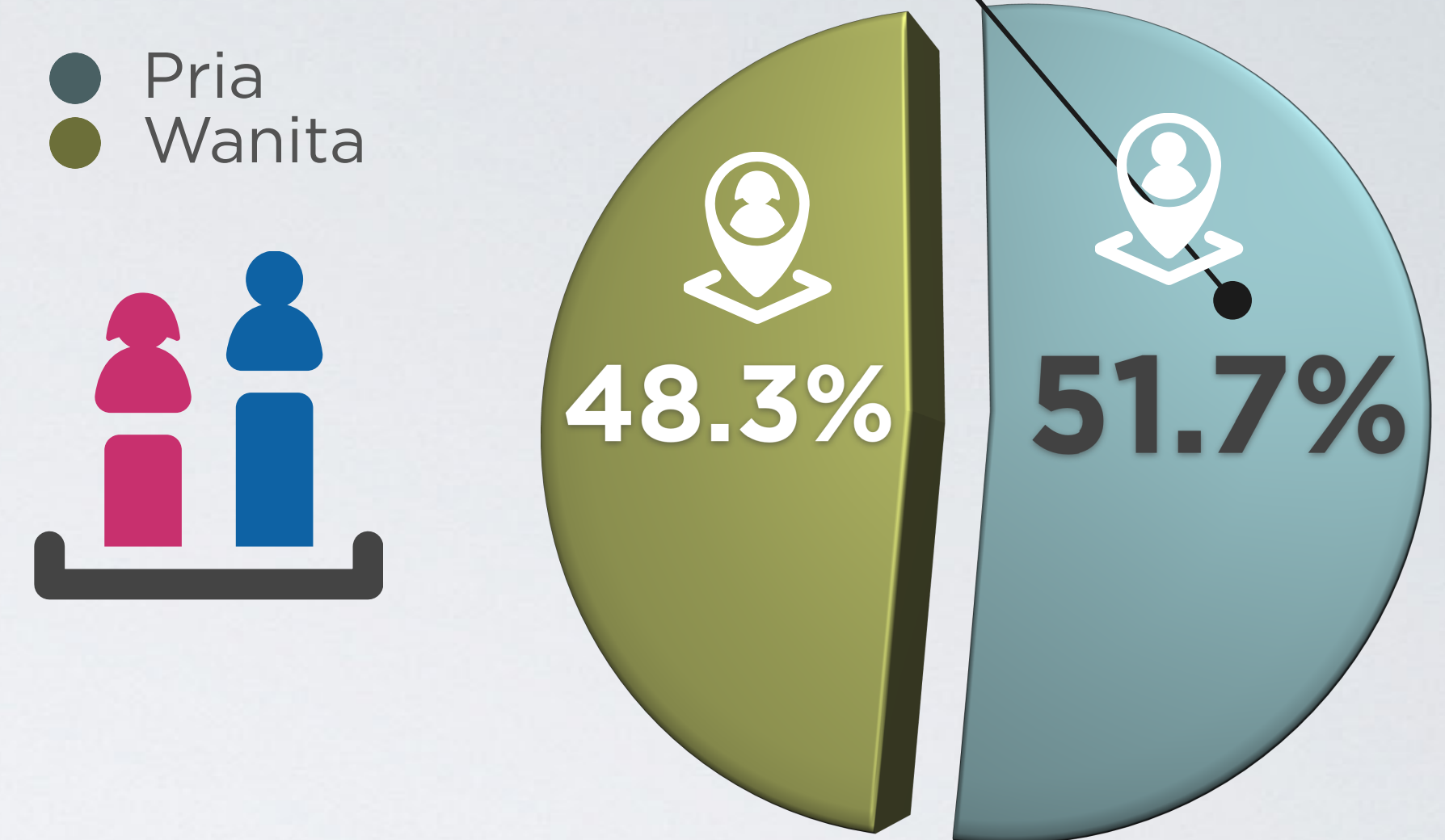
## INSTANSI :

- Pusat
- Daerah
- Swasta



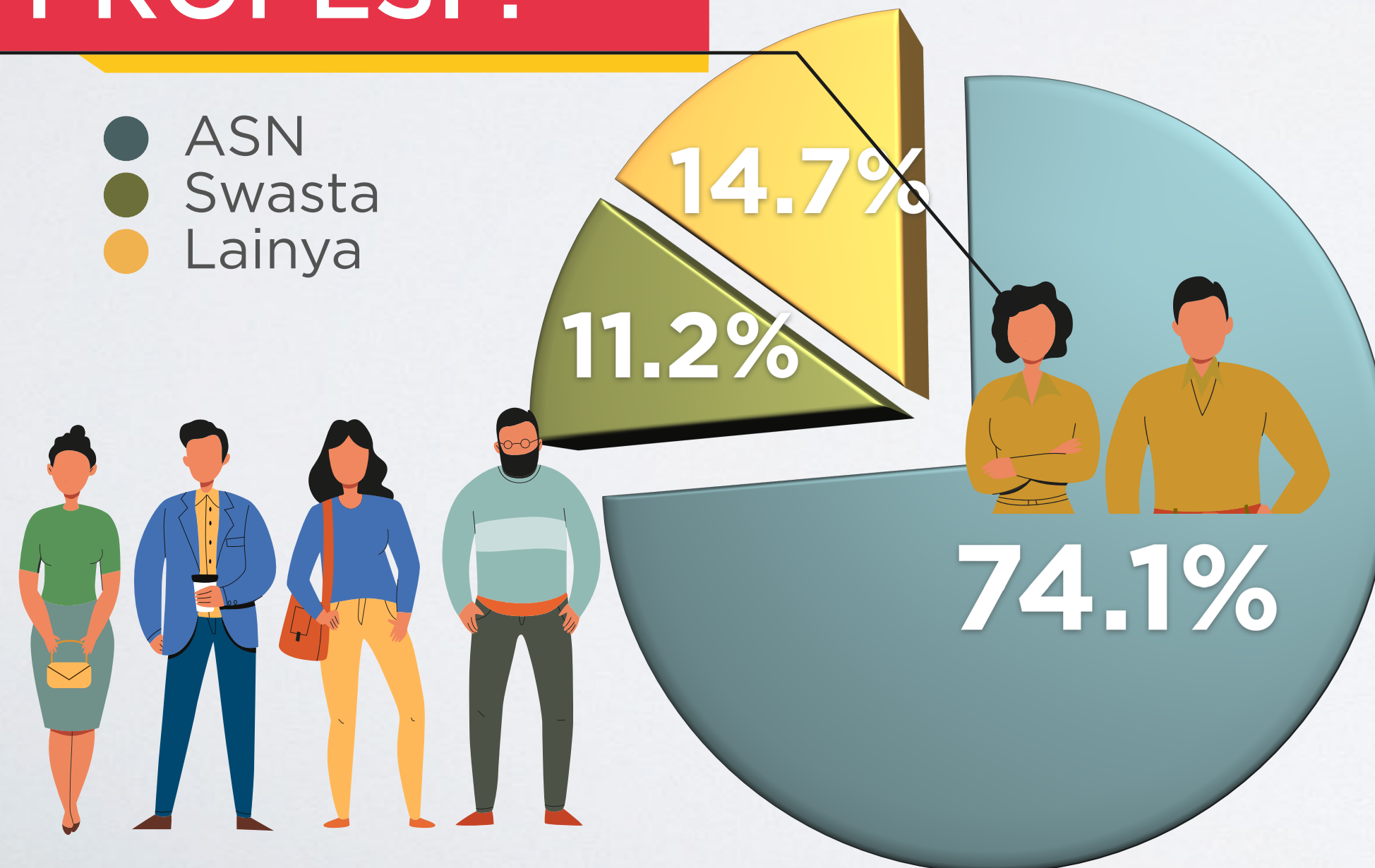
## JENIS KELAMIN

- Pria
- Wanita



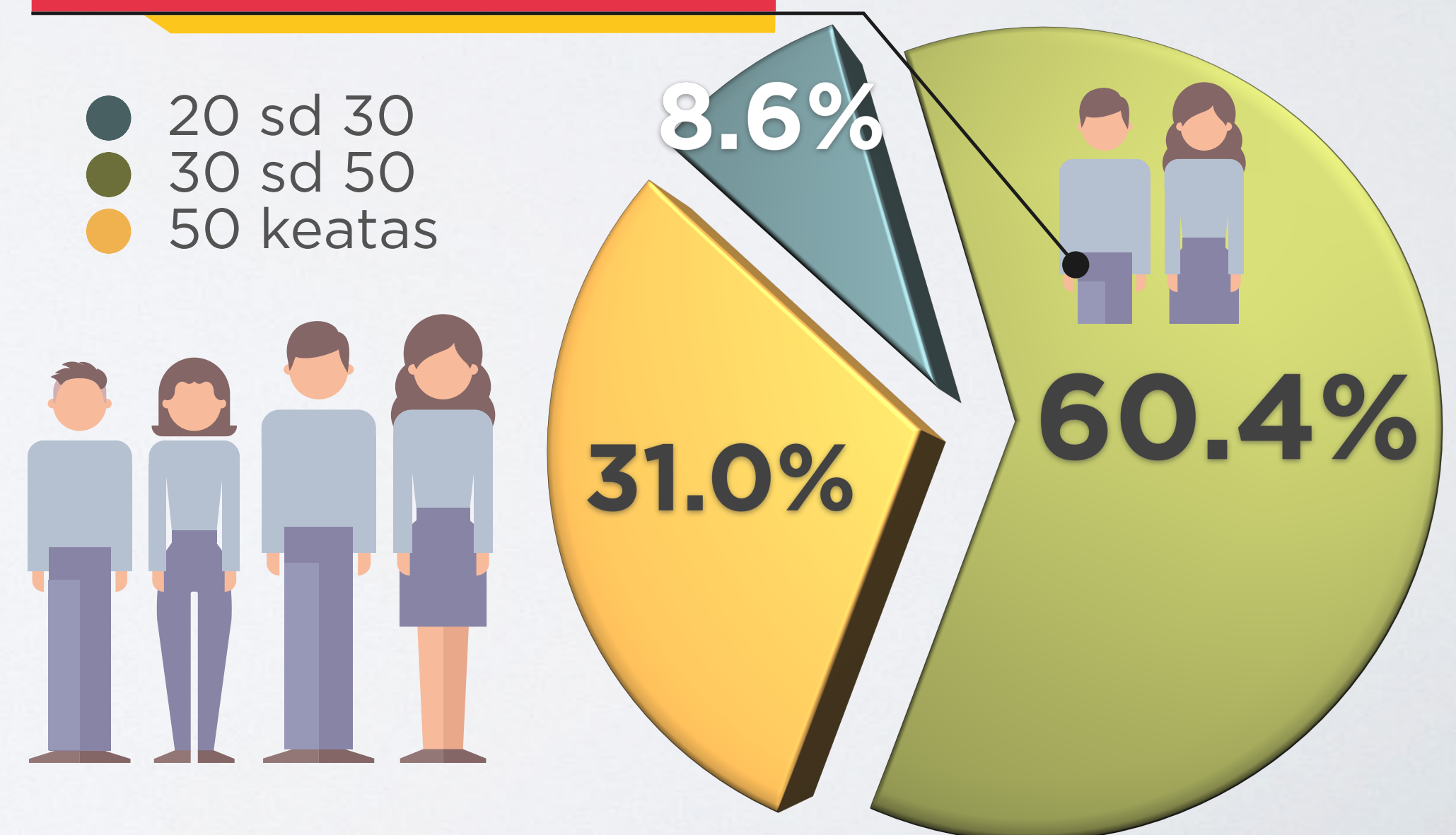
## PROFESI :

- ASN
- Swasta
- Lainya



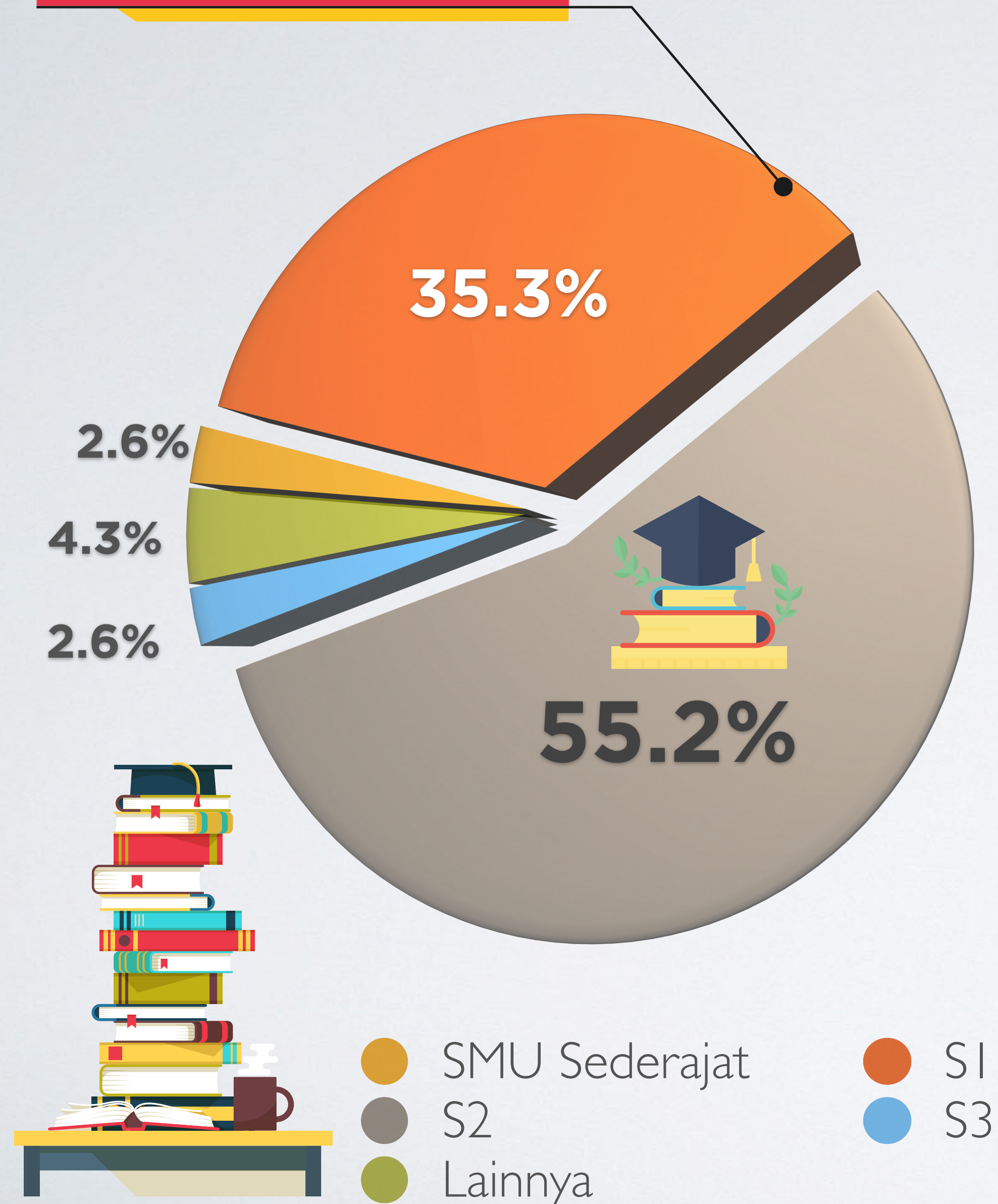
## USIA

- 20 sd 30
- 30 sd 50
- 50 keatas





## PENDIDIKAN



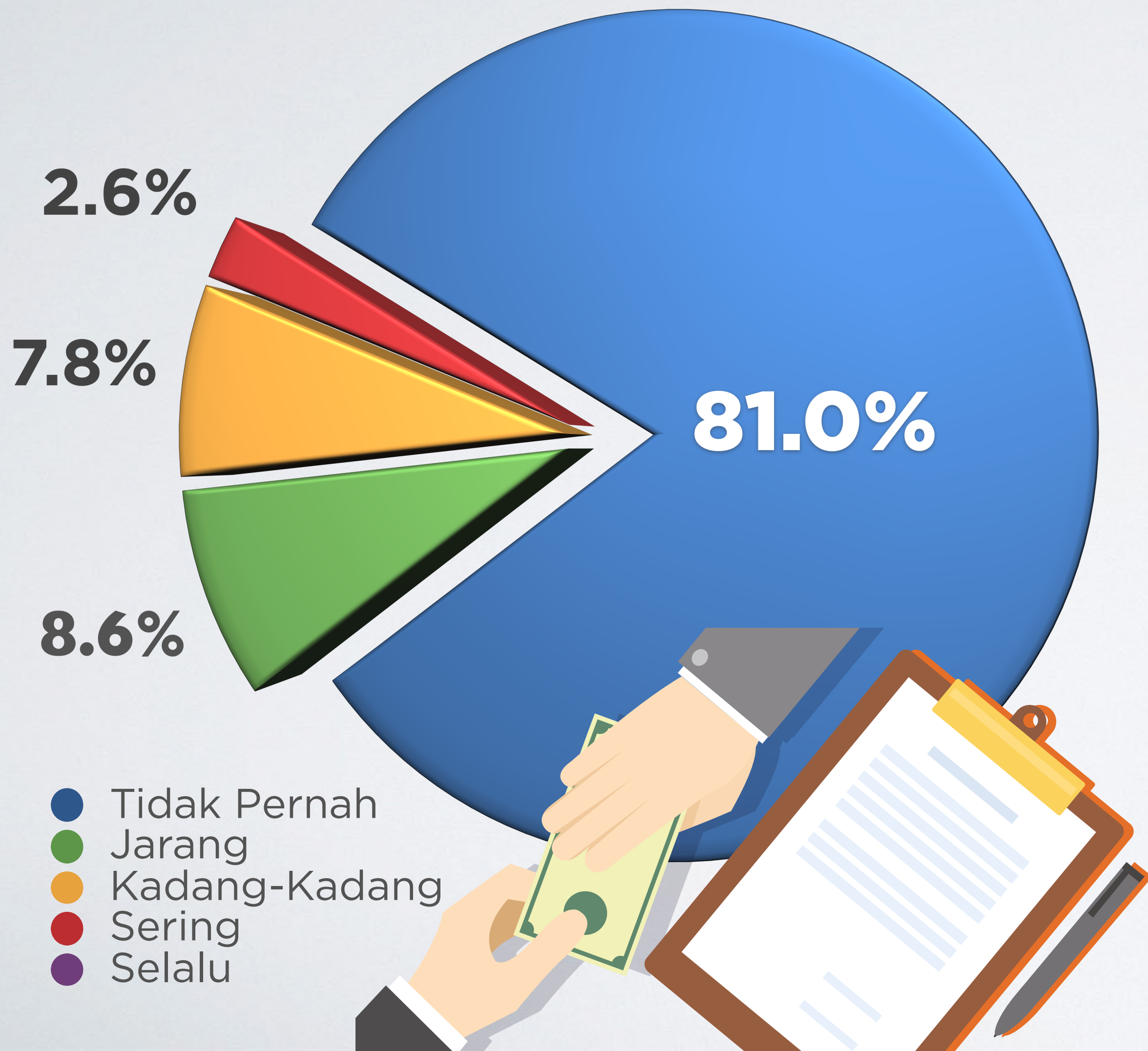
## RESPONDEN



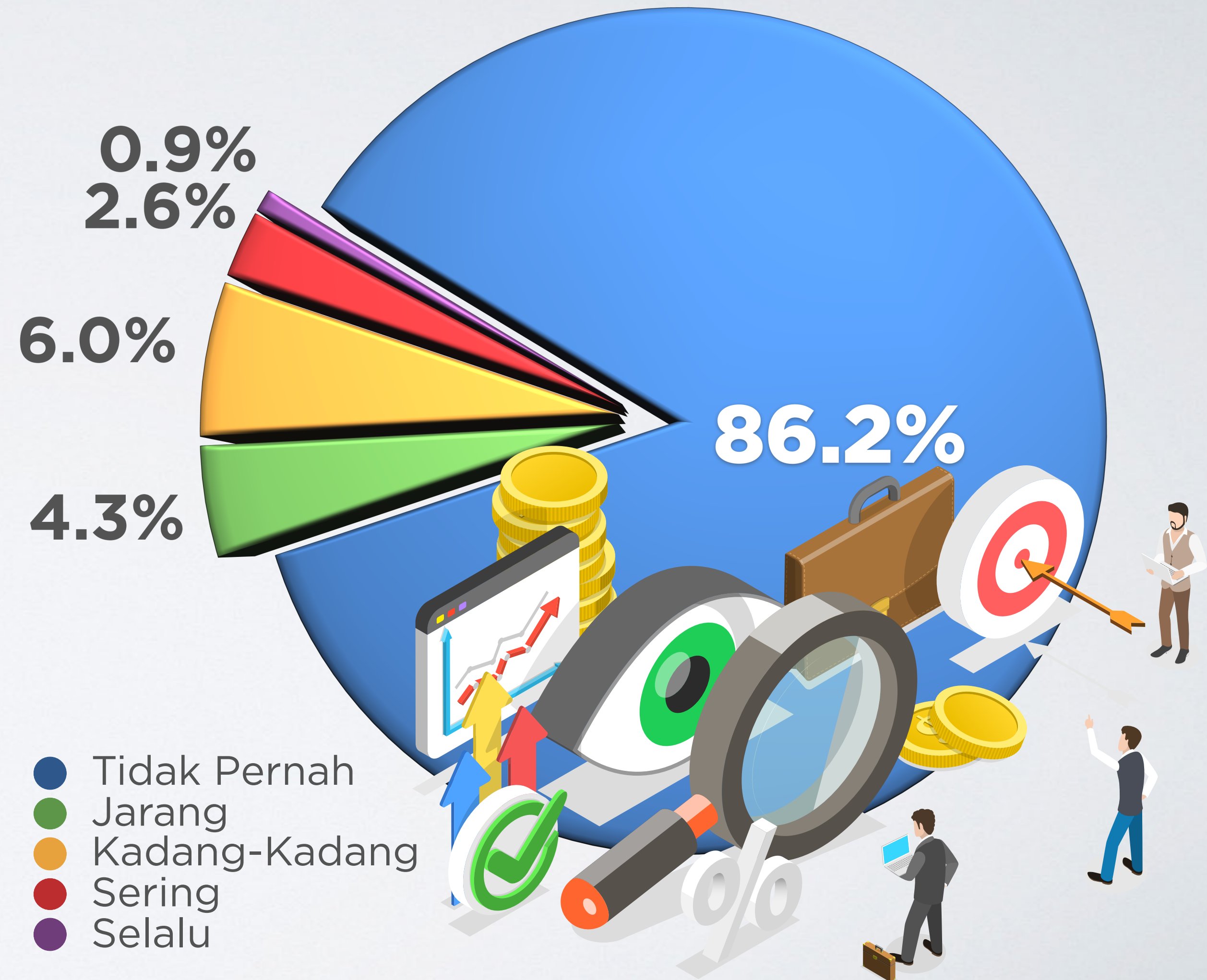
- ✓ Peserta responden yang mengikuti survey sebanyak 116 peserta;
- ✓ Sebanyak 66.4% diikuti oleh pusat, 17.2% oleh responden daerah dan 16.4% dari swasta.
- ✓ 74.1% responden berasal dari ASN, 11.2% adalah pegawai swasta, dan 14.7% adalah lainnya.
- ✓ Responden survey diikuti oleh 51.7% pria dan 48.3% adalah wanita.
- ✓ Usia responden antara 20 sampai dengan 30 tahun responden sebanyak 8.6%. Usia antara 30 sampai dengan 50 tahun sebanyak 60.3% dan sisanya responden ber-usia 50 tahun ke atas sebanyak 31%
- ✓ Sebanyak 55.2% responden berpendidikan S2, sedangkan 35.3% adalah S1, untuk pendidikan S3 sebanyak 2.6%,



Menurut pengalaman, apakah Bapak/ibu/Saudara mengeluarkan biaya tambahan di luar biaya resmi layanan?

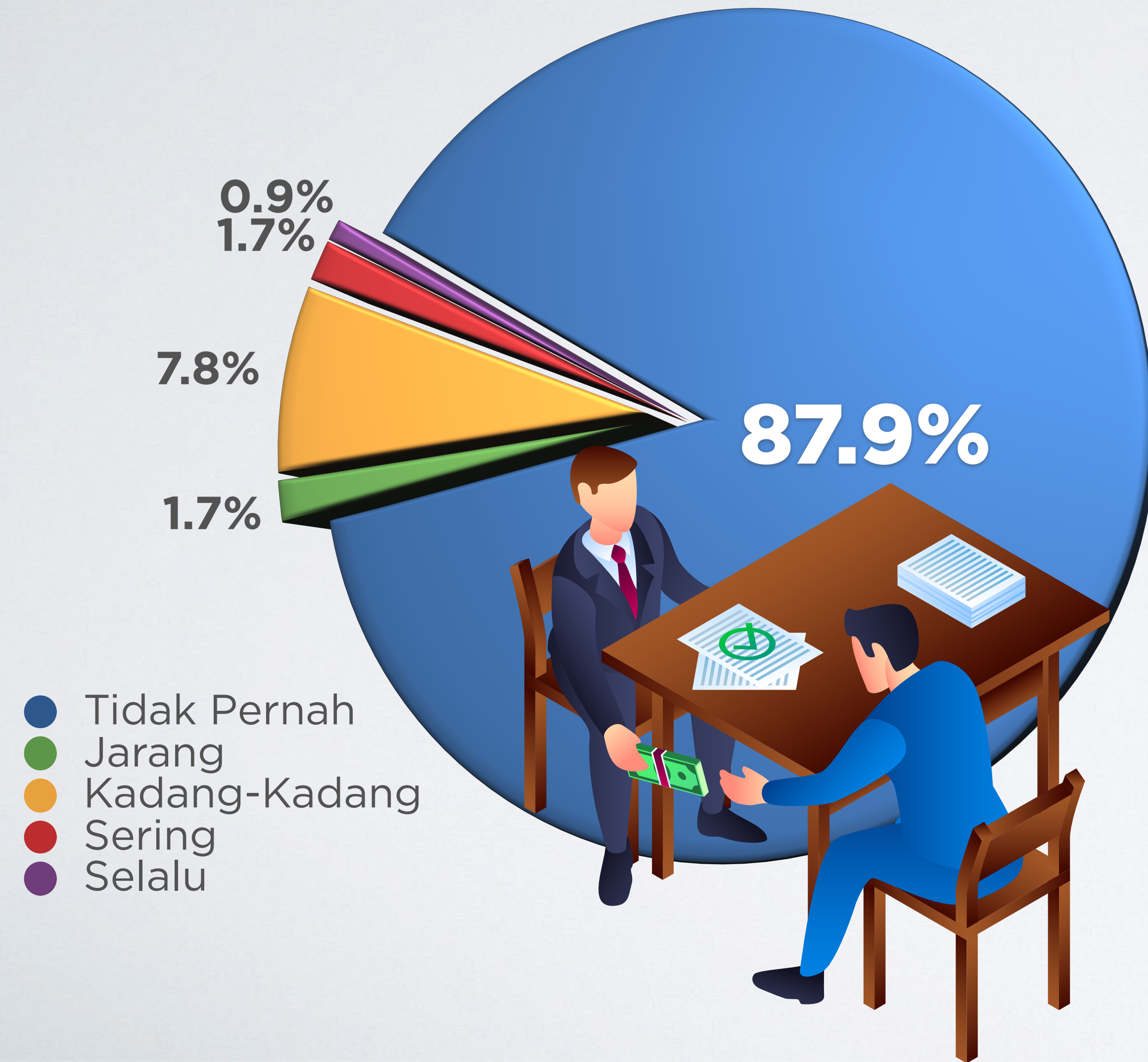


Apakah Bapak/Ibu/Saudara ditawarkan memperoleh pelayanan yang lebih cepat/mudah dengan memberikan imbalan tertentu?





Apakah Bapak/Ibu/Saudara dimintakan komisi/imbal jasa dalam pengurusan layanan?



Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah melihat, mendengar atau mengetahui terjadinya praktek KKN pada Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan?



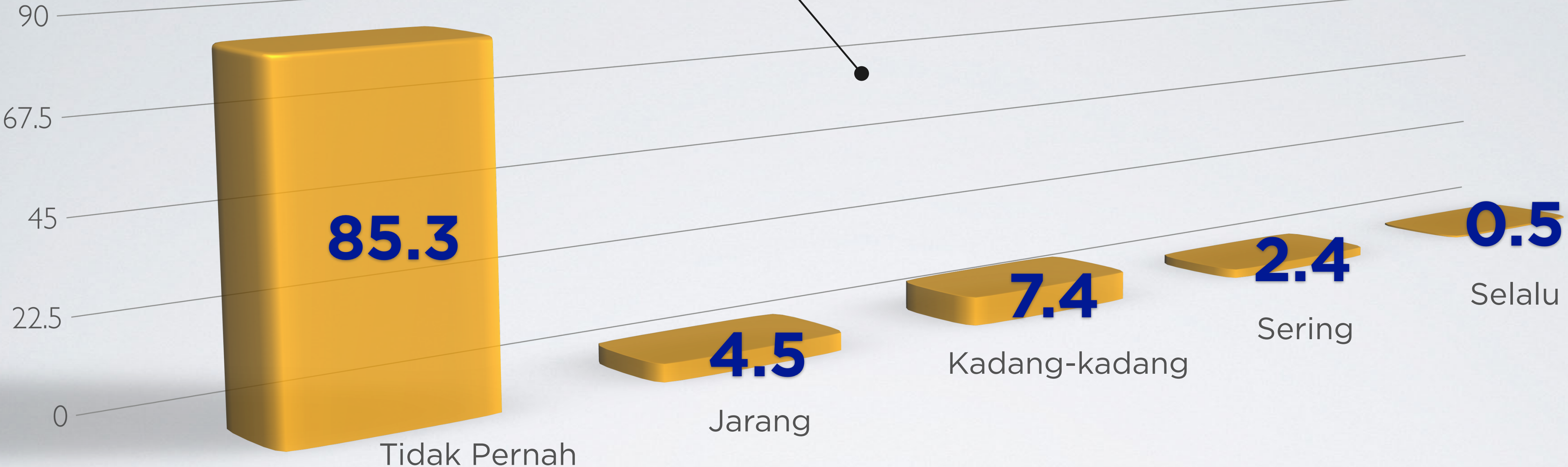


# Saran masukan untuk mendukung pemerintahan yang bebas KKN

- ☑ Integritas yg baik ini dapat ditularkan kepada tingkat daerah supaya jiwa bebas KKN lebih merata;
- ☑ Mungkin diperlukan satu portal untuk melaporkan jika menemukan/mengetahui adanya praktik KKN;
- ☑ Tingkatkan profesionalisme dalam pelayanan guna menghindari praktek KKN;
- ☑ Saran, agar membuat standar biaya untuk jenis pelatihan atau bimbingan teknis bagi daerah jika ada penyelenggaraan pelatihan atau bimtek. Sehingga dapat dengan mudah perangkat daerah menganggarkan kedepannya;
- ☑ Kualitas layanan tetap di pertahankan;
- ☑ Semoga semakin maju pelayanan di asdep PK;
- ☑ Kedua pihak harus mendukung pelaksanaan pemerintahan bebas KKN, pemberi layanan dan penerima layanan harus berjalan sesuai SOP;
- ☑ Agar menanamkan integritas dalam setiap jiwa pegawai melalui pelatihan, bimtek dan kegiatan lainnya;
- ☑ Transparansi informasi pelayanan dan keuangan pada publik melalui social media;
- ☑ Setiap instansi wajib menerapkan zona integritas bebas pungutan dan lain-lain;
- ☑ Usahan pelayanan secara online dan 1 pintu;
- ☑ Sudah sangat baik;
- ☑ Koordinasi secara intensif mohon lebih ditingkatkan kembali;
- ☑ Transparansi dan publikasi terbuka;
- ☑ Terus tingkatkan mutu pelayanan yang prima;
- ☑ Perlu diinformasikan secara tegas, pelayanan yg diberikan tidak dipungut biaya dan dilarang memberikan imzalan dalam bentuk apapun;
- ☑ Tetap jaga integritas;
- ☑ Penerapan asas good governance, kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas;
- ☑ Jaga dan tingkatkan terus integritas pegawai Setwapres;
- ☑ Tingkatkan pemerintahan bebas KKN;
- ☑ Keep the good work;
- ☑ Tetaplah mempertahankan jiwa kepemimpinan yang bebas KKN;
- ☑ Keterbukaan dan transparansi;
- ☑ Pertahankan serta tingkatkan kinerja pelayanan yang ada, berani untuk tidak KKN;
- ☑ Sosialisasi tentang layanan pada masyarakat di daerah;
- ☑ Semoga pelayanan yang dilakukan jangan selalu mengorbankan masyarakat;
- ☑ Sudah sangat baik sekali.



JAWABAN RATA-RATA RESPONDEN



No	Tidak Pernah	Jarang	Kadang-Kadang	Sering	Selalu
1	81.0	8.6	7.8	2.6	0.0
2	86.2	4.3	6.0	2.6	0.9
3	87.9	1.7	7.8	1.7	0.9
4	86.2	3.4	7.8	2.6	0.0
Rata2	85.3	4.5	7.4	2.4	0.5